
Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)

Website: ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUDIKA | E-ISSN: XXXX-XXXX



Peranan Aparatur Pemerintah Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan)

Isnan Hari Mardika

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi dan membuktikan adanya pengaruh kualitas aparatur pemerintahan dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 165 orang responden menggunakan metode purposive sampling. Instrumen data yang digunakan dalam bentuk angket kuesioner dengan pengukuran model skala likert.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software Amos 22 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%).

*Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,537 dengan nilai CR 2,514 > 1,967 dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (**). Pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pengaruhnya positif signifikan sebesar 0,482 dengan nilai C.R. 3,555 > 1,967 dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (**).*

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 20 Januari 2021

Ditelaah: 23 Maret 2021

Diterima: 30 Maret 2021

Publikasi daring:

01 Juni 2021

Kata Kunci: Kualitas Aparatur Pemerintah, Audit Internal, Kualitas Laporan Keuangan

Januari – Juni 2021, Vol 1 (1) : Hal, 1-13

©2021 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

Korespondensi:

isnandicka@gmail.com (Isnan Hari Mardika)

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada aturan undang-undang dan dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk upaya nyata untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas terwujud dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna. (Nurillah dalam Kinarayanti, 2016). Akan sangat berguna jika informasi dapat membantu dan dipercaya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. (Husna dalam Kinarayanti, 2016).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pasalnya, BPK menemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 memeriksa atas 533 LKPD, dan memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD.

Dasar pemikirannya adalah bahwa pemahaman aturan yang tidak sempurna menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan cenderung menggunakan naluri daripada aturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman dasar menjadi salah satu kendala penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji. (Tickell dalam Kinarayanti, 2016). Oleh karena itu, tinggi rendahnya pemahaman otoritas regulator mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. (Kartikasari, 2012).

Penelitian mengenai pemahaman regulasi masih relatif terbatas artinya baru beberapa peneliti saja yang menyinggug soal itu. Beberapa diantaranya dilakukan oleh Kartikasari (2012), Rahayu (2014), Dora (2014), Alfiansyah dan Hariyanto (2012). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan belum menggunakan pemahaman regulasi terkait PP 71 tahun 2010 dan belum menguji pemahaman regulasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain topik yang berkaitan dengan kualitas aparatur pemerintahan, kualitas LKPD juga bisa dipengaruhi oleh peran audit internal nya. Seperti pada penelitian Yuliani (2010:216) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh

simultan terhadap laporan keuangan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahman (2016 :64) dimana secara parsial peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung artinya apabila semakin baik kinerja audit internal pemerintah maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2014:41) Ditemukan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya penguatan peran pengawasan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan audit internal dalam mengidentifikasi inkonsistensi, kesalahan/penyimpangan belum optimal. Oleh karena itu, kesalahan dalam pencatatan operasional dan pembukuan yang lengkap tidak terdeteksi sampai diperiksa oleh BPK. Kesalahan ini berhubungan dengan, misalnya, manajemen keuangan dan penilaian aset lokal. Hal ini dibuktikan dengan hasil direksi yang sebelumnya tidak terungkap dalam pemeriksaan negara.

Pada kasus Kota Tangerang Selatan, dengan kondisi Kota Tangerang Selatan sendiri yang masih tergolong “muda” hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD tahun anggaran 2012 (bpk.go.id/ diakses pada Agustus 2017). Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sedangkan pada tahun anggaran yang sama Pemerintah Kota Tangerang Selatan terindikasi adanya korupsi alat kesehatan.

Pada tahun anggaran 2013, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan adanya kelemahan yang terjadi yaitu belum optimalnya penatausahaan, inventarisasi, dan penilaian aset. Selain itu, ditemukan fakta belum optimalnya mekanisme dan penatausahaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial; dan belum optimalnya pengelolaan piutang (bpk.go.id/ diakses pada Agustus 2017).

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintahan dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Kota Tangerang Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dimana peneliti akan menggunakan angket (kuesioner) sebagai alat pengumpul data dengan cara menyebarkan kepada responden (sampel) dari populasi yang telah ditentukan. Desain studi pada penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel, dan desain studi kausal berguna untuk memahami dan memprediksi

hubungan ini. Tujuan penelitian kausalitas adalah untuk mengembangkan model penelitian dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian Keuangan Dinas, Bagian dan Kantor Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan masing – masing 6 Orang ditambah dengan jumlah auditor pada Inspektorat Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 12 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 orang.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel – variabel yang akan di uji, meliputi 3 (tiga) jenis variabel sebagai berikut :

1. Variabel laten eksogen atau independent variable adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel endogen yaitu, Kualitas Aparatur Pemerintah (X1) yang diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skills*) dan Perilaku (*Attitude*). Selanjutnya adalah Peran Audit Internal (X2) yang diukur dengan Kepatuhan (*compliance*), Verifikasi, Evaluasi dan Rekomendasi.
2. Variabel laten endogen atau dependent variable adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel eksogen yaitu, Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu relevan, andal ,dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Struktural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS 22.0. Menurut Sugiyono (2010: 323), SEM dapat digambarkan sebagai analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur. Dengan demikian, dalam analisis SEM, tiga jenis tindakan dapat dilakukan secara bersamaan. Yaitu, untuk memverifikasi validitas dan reliabilitas alat (berkaitan dengan analisis faktor konfirmatori), untuk menguji model hubungan antar variabel (terkait dengan analisis jalur), dan untuk mendapatkan model yang cocok untuk prediksi tindakan (berkaitan dengan analisis regresi atau model struktural). analisis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

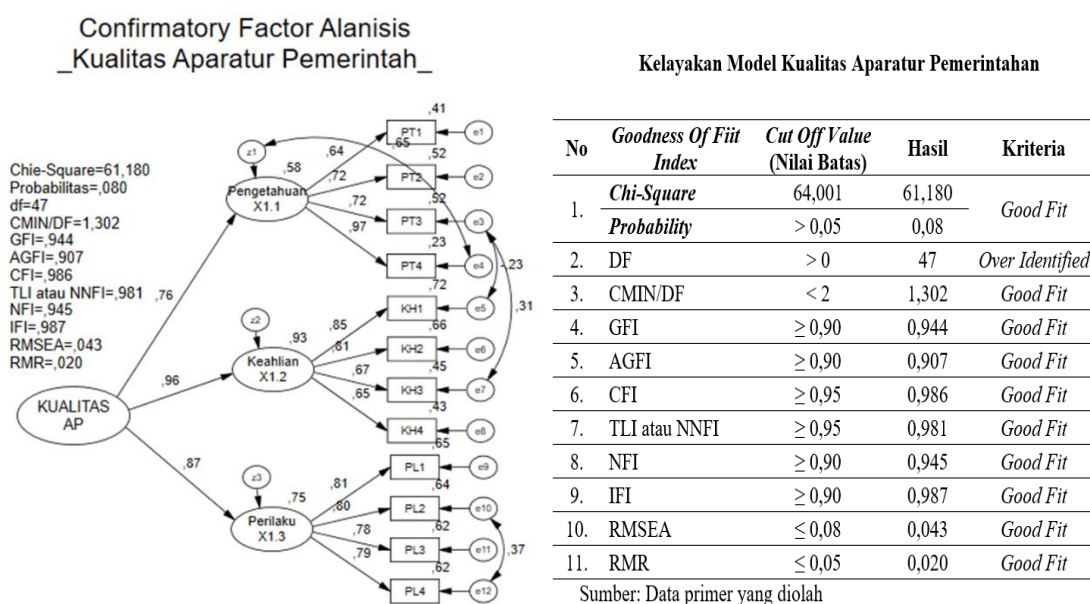
1. Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis faktor konfirmatori dirancang untuk menguji satu-dimensi data desain teoritis. Analisis ini sering disebut sebagai uji kelayakan dari suatu desain teoritis. Variabel laten dalam penelitian ini terdiri dari beberapa indikator atau variabel eksplisit berdasarkan suatu konsep teoritis. Analisis konfirmasi adalah untuk memverifikasi apakah indikator dan parameter yang merupakan komposisi laten merupakan pengukuran yang merupakan komposisi laten, bukan indikator yang sebenarnya. Tujuannya. Uji kecocokan model dalam

confirmatori factor analysis dilakukan dengan melihat beberapa kriteria Goodness of fit model seperti nilai Chi Square, probabilitas, df, GFI, AGFI, TLI, CFI RMSEA dan RMR yang merujuk pada kriteria model fit yang terdapat pada tabel goodness of fit index.

a. Analisis *confirmatory factor construct* Kualitas Aparatur Pemerintah (X1)

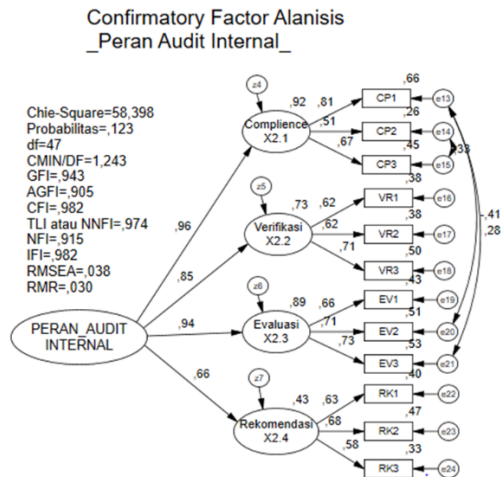
Hasil modifikasi model CFA Kualitas Aparatur Pemerintahan menunjukkan bahwa model mempunyai goodness of fit yang baik dengan nilai probabilitas dari Chi-Square > 0,05 yaitu sebesar 0,08 serta nilai-nilai DF, GFI, AGFI, CFI, TLPI, CMNI/DF, dan RMSEA telah memenuhi nilai yang direkomendasikan. Hasil pengujian kesesuaian model diringkas dalam tabel berikut ini.



Gambar 4.1. Analisis Faktor Konfirmatori X1

b. Analisis *confirmatory fantor construct* Peran Audit Internal (X2)

Hasil modifikasi model CFA Peran Audit Internal menunjukkan goodness of fit yang baik dan dapat diterima yaitu dengan nilai probabilitas dari Chi-Square > 0,05 yaitu sebesar 0,123 serta nilai-nilai DF, GFI, AGFI, CFI, TLPI, CMNI/DF, dan RMSEA telah memenuhi nilai yang direkomendasikan. Uji kelayakan model Peran Audit Internal secara lebih rinci diringkas dalam tabel berikut:



Kelayakan Model Peran Audit Internal

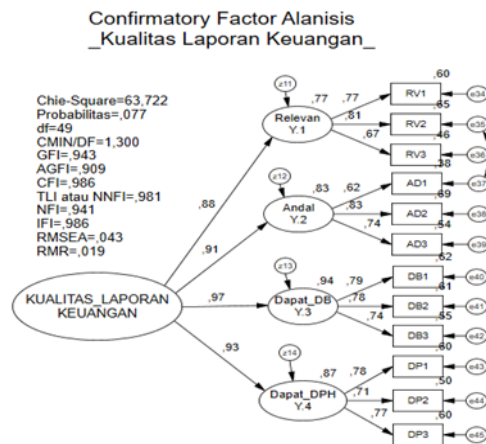
No	Goodness Of Fit Index	Cut Off Value (Nilai Batas)	Hasil	Kriteria
1.	<i>Chi-Square</i>	64,001	58,398	<i>Good Fit</i>
	<i>Probability</i>	> 0,05	0,123	
2.	DF	> 0	47	<i>Over Identified</i>
3.	CMIN/DF	< 2	1,243	<i>Good Fit</i>
4.	GFI	≥ 0,90	0,943	<i>Good Fit</i>
5.	AGFI	≥ 0,90	0,905	<i>Marginal Fit</i>
6.	CFI	≥ 0,95	0,982	<i>Good Fit</i>
7.	TLI atau NNFI	≥ 0,95	0,974	<i>Good Fit</i>
8.	NFI	≥ 0,90	0,915	<i>Good Fit</i>
9.	IFI	≥ 0,90	0,982	<i>Good Fit</i>
10.	RMSEA	≤ 0,08	0,038	<i>Good Fit</i>
11.	RMR	≤ 0,05	0,030	<i>Good Fit</i>

Sumber: data primer diolah

Gambar 4.2. Analisis Faktor Konfirmatori X2

c. Analisis *confirmatory factor construct* Peran Audit Internal (X2)

Model CFA kualitas laporan keuangan menunjukkan goodness of fit yang baik dan dapat diterima yaitu dengan nilai probabilitas dari Chi-Square > 0,05 yaitu sebesar 0,077 serta nilai-nilai DF, GFI, AGFI, CFI, TLPI, CMNI/DF, dan RMSEA telah memenuhi nilai yang direkomendasikan. Uji kelayakan model dari konstruk kualitas laporan keuangan.

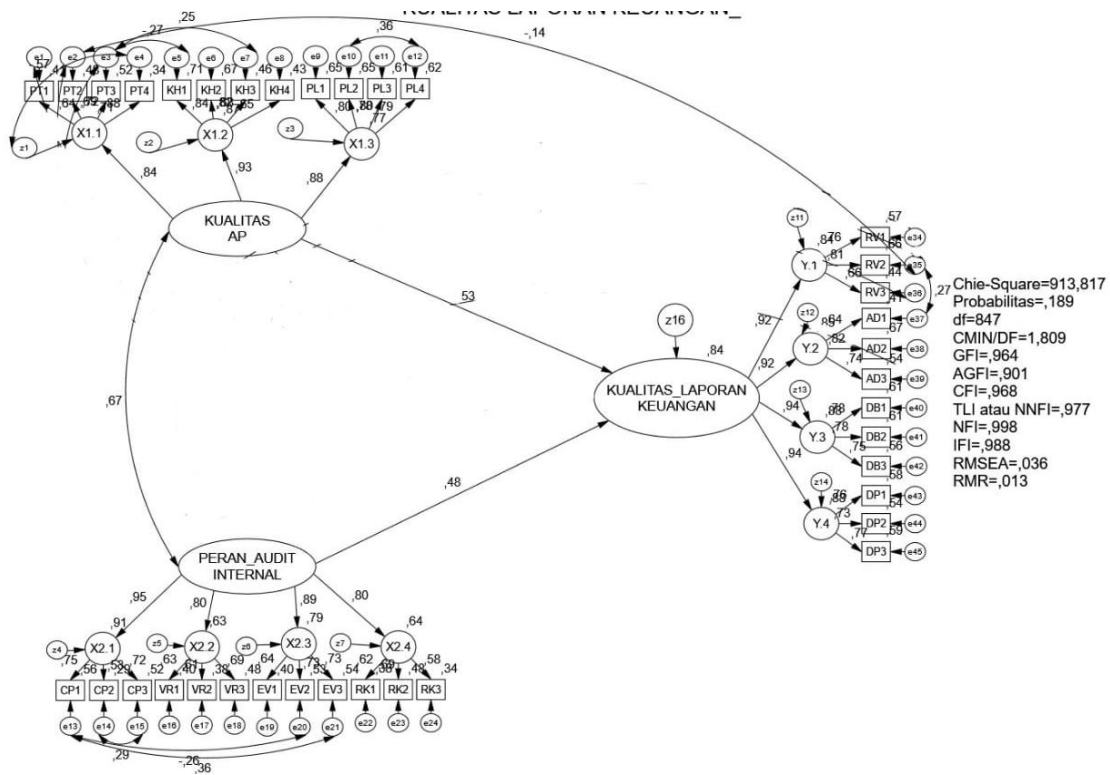


No	Goodness Of Fit Index	Cut Off Value (Nilai Batas)	Hasil	Kriteria
1.	<i>Chi-Square</i>	66,338	63,722	<i>Good Fit</i>
	<i>Probability</i>	> 0,05	0,077	
2.	DF	> 0	49	<i>Over Identified</i>
3.	CMIN/DF	< 2	1,300	<i>Good Fit</i>
4.	GFI	≥ 0,90	0,986	<i>Good Fit</i>
5.	AGFI	≥ 0,90	0,909	<i>Good Fit</i>
6.	CFI	≥ 0,95	0,986	<i>Good Fit</i>
7.	TLI atau NNFI	≥ 0,95	0,981	<i>Good Fit</i>
8.	NFI	≥ 0,90	0,941	<i>Good Fit</i>
9.	IFI	≥ 0,90	0,986	<i>Good Fit</i>
10.	RMSEA	≤ 0,08	0,043	<i>Good Fit</i>
11.	RMR	≤ 0,05	0,019	<i>Good Fit</i>

Gambar 4.2. Analisis Faktor Konfirmatori X2

2. Analisis Full Model Structural Equation Modeling (SEM)

Analisis berikut adalah analisis pemodelan persamaan struktural penuh (SEM) setelah analisis univariat dari ukuran dan indikator yang merupakan variabel laten atau konstruksi ekstrinsik dan endogen yang divalidasi melalui analisis faktor konfirmatori. Analisis hasil pengolahan data pada semua tahapan model SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik.



Gambar 4.4. Full Model SEM Analisis

Uji kelayakan model dari konstruk full model secara lebih rinci diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Uji Kelayakan Model

No	Goodness Of Fiit Index	Cut Off Value (Nilai Batas)	Hasil	Kriteria
1.	Chi-Square	915,817	913,817	Good Fit
	Probability	> 0,05	0,189	
2.	DF	> 0	847	Over Identified
3.	CMIN/DF	< 2	1,809	Good Fit
4.	GFI	≥ 0,90	0,964	Good Fit
5.	AGFI	≥ 0,90	0,901	Good Fit
6.	CFI	≥ 0,95	0,968	Good Fit
7.	TLI atau NNFI	≥ 0,95	0,977	Good Fit
8.	NFI	≥ 0,90	0,998	Good Fit
9.	IFI	≥ 0,90	0,988	Good Fit
10.	RMSEA	≤ 0,08	0,036	Good Fit
11.	RMR	≤ 0,05	0,013	Good Fit

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa model yang digunakan dapat diterima dan menunjukkan sebagai suatu model persamaan struktural yang baik. Pada indek pengukuran Goodness Of Fiit Index letaknya berada

dalam rentang nilai yang diharapkan. Dengan demikian uji kelayakan model SEM sudah memenuhi syarat penerimaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diadopsi hipotesis dasar analisis SEM yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara matriks kovarians data variabel yang diamati dengan matriks kovarians model yang ditentukan (matriks kovarians implisit). Hal ini menunjukkan bahwa kedua persamaan struktural yang diturunkan dari model penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel eksogen dan endogen. Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat diuji secara statistik untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling signifikan dan dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah semua asumsi dapat dipenuhi dari hasil uji yang dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pengujian pada hipotesis yang diajukan sebagaimana yang ditulis pada bab sebelumnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai t-value dengan tingkat signifikan 0,05. H_0 ditolak (hipotesis penelitian diterima) apabila nilai t-value $\geq 1,967$ atau nilai probabilitas (P) $\leq$ dari 0,05. Hasil Regression Weights hasil pengolahan AMOS 22.00 terhadap full Model tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Regression Weight

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
KUALITAS_LAP_KEU <--- KUALITAS_AP	,537	,257	2,514	***	par_57
KUALITAS_LAP_KEU <--- P_AUDIT_INT	,482	,489	3,555	***	par_58

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian signifikansi variabel dimana C.R semua variabel menunjukkan nilai $\geq 1,967$ dan nilai probabilitas (P) $\geq$ dari 0,05. Nilai signifikan pengaruh variabel kualitas aparatur pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan adalah 0,537 dengan nilai C.R. 2,514 $> 1,967$ dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (***), dengan demikian dapat disimpulkan H_0 ditolak dan kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan begitu semakin baik kualitas aparatur pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan, begitu pun sebaliknya. Sedangkan, nilai signifikan pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah 0,482 dengan nilai C.R. 3,555 $> 1,967$ dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (***), maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan begitu semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, begitu sebaliknya.

Guy et al. (2002) dalam Fikri dkk (2016:10), dalam tulisanya mengatakan kompetensi dikatakan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemampuan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah berupa pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi SDM yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, akan menambah nilai kandungan informasi laporan keuangan pemerintah daerah..

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai estimate 0,362 dan nilai C.R. 2,514 > 1,967 dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (***), yang maknanya adalah jika semakin baik kualitas aparatur pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan dilingkungan kota Tangerang Selatan cukup baik dilihat dari data yang diperoleh dimana tingkat pendidikan responden yakni S1 sebanyak 78 orang (47%), tingkat S2 sebanyak 23 orang (14%), tingkat S3 adalah sebanyak 3 orang (2%), tingkat Diploma sebanyak 42 orang (25%) dan tingkat SMA sebanyak 19 orang (12%). Selain itu, Alatar belakang jurusan yang diambil pada pendidikan terakhir responden juga cukup baik dimana didominasi oleh jurusan akuntansi sebanyak 98 orang (59%).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang pada tulisanya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menolak hasil pernyataan Fikri dkk (2016:10) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD Pemprov NTB. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil keterikatan kuat dengan teori birokrasi dimana menurut Weber (1948) Sistem administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari disusun dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan menurut aturan tertulis, dilakukan pada bagian tertentu, dipisahkan dari bagian lain dan dilakukan oleh orang yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. di bidang mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat Merupakan bagian integral dari kotamadya dan ditunjuk untuk menentukan keandalan informasi yang diberikan oleh berbagai unit/unit kerja. Dewan Audit dan Inspeksi menentukan keandalan informasi keuangan yang diberikan oleh SKPD dengan meninjau laporan keuangan. Proses review laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontribusi auditor pada proses review ini akan memandu penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dari perspektif peningkatan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri..

Menurut Fikri dkk. (2016:11) Auditor internal merupakan salah satu profesi yang mendukung penerapan GCG, yang kini telah menjadi komponen penting dalam meningkatkan kinerja lembaga. Semakin baik proses pemantauan atau review atas kegiatan yang dilakukan auditor internal (APIP) dengan suatu instansi pemerintah, maka semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan teori diatas, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan, yang mana hasil pengujian signifikansi menunjukkan nilai estimate 0,332 dan nilai C.R. 3,555 > 1,967 dan nilai probabilitas (P) sebesar 0,000 (***), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit internal pada lingkungan SKPD Kota Tangerang Selatan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya peraturan walikota tangerang no. 69 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kota Tangerang Selatan, dengan melakukan pengawasan intern melalui : audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Halmawati dan Nova (2014) menurut hasil penelitiannya pada instansi pemerintah selama ini, peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik peran audit internal, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang Anda susun.. Hasil penelitian ini menolak hasil pernyataan Fikri dkk (2016:10) Hal ini menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di CQPD pemerintah daerah NTB. Hal ini menegaskan teori birokrasi bahwa konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang dibuat secara rasional sehingga mekanisme dan sistem kerja dapat tertata, terdefinisi, dan mudah dikelola. Oleh karena itu, bentuk audit internal pemerintah dapat menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka pengaruh kualitas aparatur pemerintahan, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan penerapan SAP akrual sebagai variabel intervening. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan begitu semakin baik kualitas aparatur pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan, begitu pun sebaliknya.
2. Peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan begitu semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, begitu sebaliknya.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi pada kebijakan manajemen. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan oleh manajemen dalam menentukan skala prioritas kebijakan apa yang harus didahulukan. Berdasarkan hipotesis yang dibangun pada penelitian ini dan telah terbukti dapat diterima, yang mana variabel prediktor dapat menunjukkan pengaruh yang positif serta dapat mengoptimalkan kualitas laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan dalam hal ini diukur dari dua variabel yaitu; Kualitas Aparatur Pemerintahan dan Peran Audit Internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi dan Suhardjo 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 3(3).
- Alfiansyah, Ahdony. 2015. Strategi Implementasi Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota "S"). Jurnal NeO-Bis. Juni 2015
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Azadi Marand, Amin. 2014. The Effectiveness of Replacing Accrual Instead Of Cash Base In The Public Sector Accounting And Budgeting. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. Juni 2014.
- Bastian, Indra, 2006, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga
- Edwards George C 1980, Implementing public policy (Politics and public policy series), Congressional Quarterly Press
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Artikel. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses pada 7 September 2014.
- Fikri. Dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov. NTB). Universitas Mataram NTB
- Franselski Sampel, Indra et al. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis AkruaL.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Herlina, H. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi. Dharma Ekonomi. No. 36.
- Indrawati, Lia. 2017. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

- Akrual Atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kota Probolinggo). International Repository UMM.
- Irwan, Dedi (2011). Pengaruh Penerapan SPIP, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis. Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang.
- Istijanto, 2005. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartikasari, Dewi. 2012. Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.
- Kartika Adhi, Daniel dan Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang. Oktober 2013.
- Kiranayanti, I.A.E., & Erawati, N.M.A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Sistem Pengendalian, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 16, No. 2, pp. 1290-1318
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- KSAP. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 3. Desember 2012.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh Imam. 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 13, No. 1.
- Mohammadi, Saman. 2012. Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran). Institute of Interdisciplinary Business Research. Juni 2012.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ningtyas, Eka Pravitasari dan Widyawati, Dini. 2015. Pengaruh Efektivitas Standar

Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No1.

Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rook, D dan Fisher, J.R.1995, "Normative influences on impulsive buying behaviour", in Bearden, W. And Netemeyer, G.R. (Eds), Handbook of Marketing Scales, 2nd ed, pp.55-56.

Santoso, Puji. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung. Universitas Lampung.

Simanjuntak, Binsar. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember 2010.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Universitas Diponegoro: Semarang.

Wansur. 2011. Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan. <http://wansur.blogspot.com>.

Wijayanti Ratna dan Handayani Nur. 2017. Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, ISSN : 2460-0585

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). Vol 1. No. 1.

<http://bpk.go.id>